

**KONSEP POLITIK MACHIAVELLI DALAM PERSPEKTIF ETIKA
POLITIK ISLAM**

Skripsi

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S.Sos
Dalam Ilmu Ushuluddin

Oleh :

Yunie Risma Riyantie
NPM : 1531040071



**PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

ABSTRAK

KONSEP POLITIK MACHIAVELLI DALAM PERSPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM

Oleh

YUNIE RISMA RIYANTIE

Machiavelli sebagai tokoh politik zaman *Renainssance* telah berhasil membuat sebuah karya yang mengelaburasikan antara system kerajaan (monarki) dan Republik, yang dia beri judul *The Prince* dan *The Discaurses*. Machiavelli menekankan pada kelihaihan pangeran dalam hal berdiplomasi harus memakai muslihat singa dan rubah (kancil). Perbedaan etika politik antara Machiavelli sangat kontras dengan etika politik Islam. perbedaan ini didasarkan dari keyakinan dasar yang juga berbeda. Machiavelli menyandarkan bahwa etika tidak diperlukan dalam politik karena akan memperlemah Negara (menghalalkan segala cara demi kestabilan Negara), karena hal itu menurutnya sia-sia. Berbeda dengan etika politik Islam, yang menyandarkan pada al Quran dan as Sunnah agar setiap penguasa selalu berpegang pada nilai etika dan moral yang telah dijelaskan dalam al Qur-an dan as Sunnah. Adapun rumusan masalah dari skripsi ini yang *pertama*, bagaimana etika politik menurut Niccola Machiavelli? Dan yang *kedua*, bagaimana pemikiran politik Machiavelli dalam Perspektif etika politik Islam? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Jenis penelitian menggunakan jenis kepustakaan (*library reasearch*). Dan sifat penelitiannya itu deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder, dalam data primer penulis menggunakan buku-buku karangan Niccola Machiavelli dan dalam data sekunder penulis menggunakan buku-buku karangan orang lain dan jurnal yang berkitan dengan Machiavelli. Metode penyimpulan data penulis menggunakan alur pemikiran historis Machiavelli. Dari penelitian tersebut, peneliti menemukan hasil bahwa sebenarnya Machiavelli telah mengargumentasikan gagasannya dalam sebuah karya yang memang memiliki peranan penting dalam dunia politik. Karna dengan karyanya itu, telah membebaskan politik dari cengkraman Gereja. Akan tetapi disisi lain Machiavelli dengan segala metode yang diajarkannya terhadap perilaku seorang penguasa telah menjastipikasi semua cara untuk mempertahankan kekuasaan dan negaranya. Dari pandangan etika politik Islam sebaliknya kekuasaan adalah amanah. Politik Islam tidak boleh menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan karena Islam memandang kekuasaan dalam pengertian transenden, kekuasaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada sang Khalik. Manusia tidak semena-mena untuk menjalankan kekuasaan, karena manusia adalah perpanjangan tangan sang Khalik dimuka bumi.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : YunieRismaRiyantie

NPM : 1531040071

Jurusan/Prodi : PemikiranPolitik Islam

Fakultas : Ushuluddin Dan Studi Agama

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “KonsepPolitik Machiavelli Dalam Perspektif Etika Politik Islam)” merupakan hasil karya sendiri, bukan duplikat ataupun mengambil karya orang lain kecuali pada bagian yang telah di rujuk dan disebut dalam Footnote atau Daftar Pustaka.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dilain waktu ada hal-hal yang tidak diinginkan saya bersedia untuk bertanggungjawab.

Bandar Lampung, 03 Juni 2020
Yang membuat pernyataan,

YUNIE RISMA RIYANTIE



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: JL. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **KONSEP POLITIK MACHIAVELLI DALAM PERSPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM**
 Nama : Yunie Risma Riyantie
 NPM : 1531040071
 Prodi : Pemikiran Politik Islam
 Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam ujian munaqosyah skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. M. Sidi Ritaudin, M. Ag

NIP. 196505101992031003

Pembimbing II

Dr. Ali Abdul Wakhid, M. Si

NIP. 197406282008011013

Ketua Jurusan

Dr. Tin Amalia Fitri, M. Si

NIP. 19780130201101204



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **“KONSEP POLITIK MACHIAVELLI DALAM PERSPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM”** disusun oleh: **YUNIE RISMA RİYANTIE**, NPM. 1531040071, Prodi: **Pemikiran Politik Islam**, telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama pada Hari/Tanggal: **Jum'at/15 Mei 2020**, pada pukul **09:00-10:30 WIB**.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : **Dr. M. Afif Anshori, M.Ag**

Sekretaris : **Yoga Irawan, M.Pd**

Penguji Utama : **Drs. Agustamsyah, M.I.P**

Penguji I : **Dr. M. Sidi Ritaudin, M.Ag**

Penguji II : **Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama

Dr. M. Afif Anshori, M.Ag
NIP. 196003131989031004

MOTTO

ذَرِينِ إِنَّ اللَّهَ سَبِيلٍ عَنِ فَيُضِلُّكَ الْهَوَى تَتَّبِعِ وَلَا بِالْحَقِّ النَّاسِ بَيْنَ فَاحْكُمِ الْأَرْضِ خَلِيفَةً جَعَلْنَاكَ إِنَّا بِنْدِ أَوْدُ

الْحِسَابِ يَوْمَ نَسُوا إِيمَانَهُمْ شَدِيدًا عَذَابٌ لَهُمْ اللَّهُ سَبِيلٍ عَنِ يَضِلُّونَ أَل

Artinya : *“hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat. Karena mereka melupakan hari perhitungan.*

(QS. Shaad:26)¹

¹Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penerjemahan dan Pentashih Al-Quran. 1977), h. 736.

PERSEMBAHAN

Segeanp rasa syukur dan terimakasih skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang telah berjasa serta memberikan motivasi dan dukungan selama penulis menuntut ilmu;

1. Allah subhanahu wa ta'ala, yang memberikan segala nikmat dan anugerah-Nya kepada setiap hamba-Nya serta memberikan kekuatan bagi hamba-Nya.
2. Kedua orang tuaku tercinta, Ubak Hamidi dan Umak Herlina, yang mendidik sejak kecil sampai dewasa, dan berkat doa restu keduanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah ini. Semoga semua ini merupakan hadiah terindah untuk keduanya, terimakasih sebanyak-banyaknya Umak, Ubak, kalian orang tua terhebat di dunia ini.
3. Sebagai wujud cinta kasih sayang, skripsi ini dipersembahkan kepada adikku tersayang Yessy Faren Nisa yang selalu menumbuhkan kepercayaan diriku untuk terus maju, pemberi semangat dan dukungan terbaik kepadaku. Serta tidak berhenti memotivasiku agar tetap semangat.
4. Partner Yosi Junian Ogara, S.Sos yang selalu memberikan semangat, motivasi, arahan dan selalu sabar menemani dari awal hingga akhir ku menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu pengetahuan serta pengalaman yang tidak bisa terlupakan

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Yunie Risma Riyantie, dilahirkan di Ulak Ata pada tanggal 07 Juni 1997. Anak pertama dari dua bersaudara, dengan Ayahanda Hamidi S.Pd dan Ibunda Herlina.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 03 Ulak Ata pada tahun 2009. Selanjutnya penulis melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 01 Tanjung Raja dan selesai pada tahun 2012, kemudian penulis melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas di MAN 01 Lampung Utara dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan diterima sebagai mahasiswa jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melalui jalur Penelusuran Minat Akademik (PMA).

Bandar Lampung, 02 Januari 2020

Penulis

Yunie Risma Riyantie

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena rahmat, ridho, dan hidayah-Nya, sehingga penulis masih diberi kesehatan, kekuatan, petunjuk dan kemudahan dalam menyelesaikan penulis skripsi yang berjudul “**Konsep Politik Machiavelli Dalam Perspektif Etika Politik Islam**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana sosial (S.Sos) pada Prodi Pemikiran Politik Islam di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

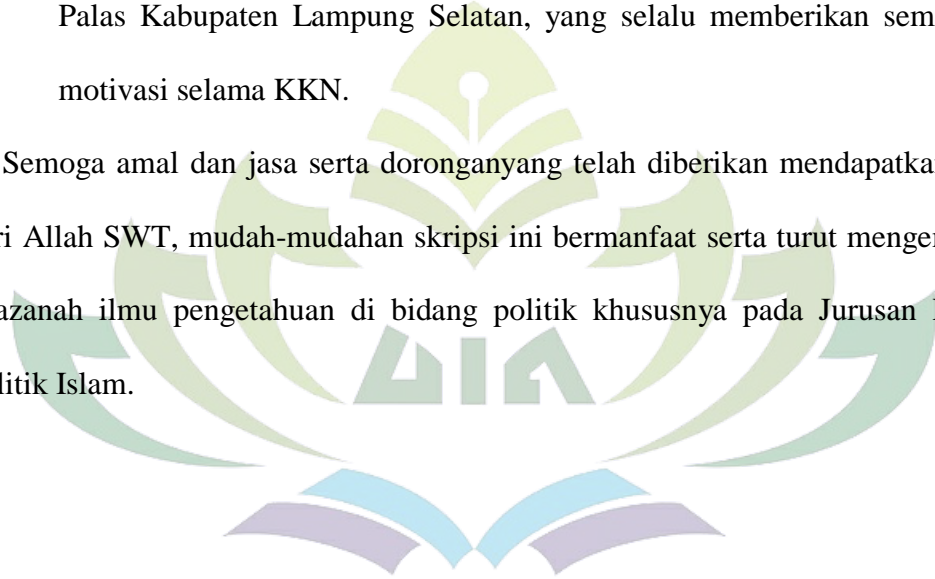
Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan hati yang tulus, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat ;

1. Bapak **Prof. Dr. H Muhammad Mukri, M.Ag** selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Bapak **Dr. H. M. Afif Anshori, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu **Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si** selaku Kepala Jurusan Pemikiran Politik Islam dan Ibu **Eska Prawisudawati Ulpa, M.Si** Sekretaris Jurusan Pemikiran Politik Islam.
4. Ibu **Siti Badiyah, M.Ag** selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama perkuliahan.

5. Bapak **Dr. M. Sidi Ritaudin, M.Ag** selaku Pembimbing I dan Bapak **Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si**, selaku Pembimbing II yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi nasehat, doa serta kepercayaan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen jurusan Pemikiran Politik Islam dan seluruh pengajar di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.
7. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan beserta staff, yang turut memberikan data berupa literature sebagai sumber dalam penulisan skripsi ini.
8. Bibik-bibikku Tersayang Unila, Sriwahyuni, Yeni Aryanti, Yeni Irmayani, Yanti Agustina, Noni Puspita Sari yang selalu kebersamaan sejak awal kuliah sampai saat ini, memberikan semangat dan motivasi untukku menyelesaikan skripsi ini.
9. Adikku Tersayang Yessy Faren Nisa dan Sepupu Wulan Septiriana yang selalu memberikan semangat, membantu dalam segala hal serta tak bosan mengingatkan dalam kebaikan.
10. Sahabat sekaligus kelompok belajar saat di bangku kuliah Nopi Mini Sari, Ayu Meta Sari, Nadia Intan Permata Sari, Kitri Lestari, Veiga Meidian Pratiwi, yang selalu memberikan motivasi dan saling menyemangati satu sama lain.

11. Teman-teman seperjuangan jurusan Pemikiran Politik Islam Angkatan 2015 yang telah memberikan sumbangsih pemikiran untuk penyelesaian skripsi ini. Terima kasih untuk berbagai pengalaman. Ilmu, serta suka duka selama menimba ilmu di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
12. Untuk teman-teman KKN kelompok 220 Di Desa Bangunan, Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama KKN.

Semoga amal dan jasa serta dorongan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat serta turut mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan di bidang politik khususnya pada Jurusan Pemikiran Politik Islam.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	4
C. Latar Belakang Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Metode Pengumpulan data.....	14
H. Pendekatan	14
I. Analisis Data	15

BAB II KAJIAN TENTANG ETIKA POLITIK ISLAM

A. Pengertian Dasar	16
1. Pengertian Etika	16
2. Pengertian Politik.....	18
3. Pengertian Etika Politik.....	19
B. Etika Politik Islam.....	27
C. Etika Politik Di Indonesia.....	36
D. Tinjauan Pustaka	40

BAB III BIOGRAFI NICCOLA MACHIAVELLI

A. Riwayat Hidup	43
1. Kondisi Lingkungan.....	45
2. Pendidikan.....	54
3. Karir dalam Kancah Politik.....	55
B. Karya Tulis.....	58
1. The Prince	60
2. The Discourses	65

BAB IV POLITIK MACHIAVELLI PERSPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM

A. Etika Politik Perspektif Niccola Machiavelli.....	70
1. Etika Perspektif Machiavelli	70
2. Politik Perspektif Machiavelli.....	76
B. Pemikiran Politik Machiavelli Menurut Perspektif Etika Politik Islam	82
1. Nilai Politis Agama.....	83
2. Fungsi dan Peran Agama	84
3. Hubungan Negara dan Agama.....	85
4. Politik dan Moralitas.....	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 110
B. Saran..... 111

DAFTAR PUSTAKA 112

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul merupakan hal terpenting dalam penelitian karya ilmiah untuk menghindari kesalahpahaman dalam pembahasan, sehingga maksud yang terkandung dalam judul lebih jelas sekaligus sebagai pembatas pembahasan lebih lanjut. sebagai lazimnya dalam setiap penyusunan skripsi atau karya ilmiah maka terlebih dahulu diberi batasan pengertian judul yang akan dibahas sehingga dalam pokok penguraiannya tidak terjadi kesimpangsiuran. Maka dari itu peneliti merasa sangat perlu untuk menjelaskan pengertian-pengertian dan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi yaitu : “KONSEP POLITIK MACHIAVELLI DALAM PERSPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM”.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata konsep dapat diartikan suatu ide, pengertian atau Rancangan dari peristiwa kongkret yang telah diabstrakkan. Untuk memahami proses atau apapun diluar bahasa dan gambaran mental dari objek yang digunakan dengan akal budi.²

Politik diartikan sebagai sebuah kajian yang menunjukkan pemikiran yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan. Politik secara etimologi diartikan

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2011), h 725.

sebagai sebuah kajian atau pembicaraan mengenai Negara dan kekuasaan dalam hal pengambilan keputusan dan pengaturan masyarakat.³

Niccolo Machiavelli lahir di Florence, tahun 1469, di sebuah kota yang berdiri sendiri, pada zaman *renaissance* (abad pencerahan).⁴ Machiavelli adalah seorang tokoh filsafat dan politikus, yang hidup di era abad ke-18. Tokoh ini sangat terkenal dengan sebutan bapak politik modern yang berhasil membebaskan rakyat dari belenggu politik dari pengaruh gereja pada waktu itu.⁵

Perspektif adalah pembahasan, analisis, atau fokus.⁶ Perspektif merupakan sudut pandang atau cara pandang kita terhadap sesuatu. Cara memandang yang kita gunakan dalam mengamati kenyataan untuk menemukan pengetahuan yang kita peroleh.

Etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk.⁷ Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab

³Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2012) cetakan keempat, h.634

⁴Dr. Firdaus Syam, M.A., *Pemikiran Politik Barat: Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke-3*. Ed.1, Cet.2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h.105

⁵ Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik Barat: Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Modern*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.87

⁶Peter Salim dan Yenny, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Edisi Pertama, Modern English, Jakarta, 1991, h. 1044

⁷Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 309.

berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Politik yaitu pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti tentang sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan.⁸

Etika Politik adalah filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia.⁹ Etika politik merupakan prinsip atau ajaran nilai sosial politik Islam, seperti persamaan (*musawah*), persaudaraan (*ukhuwah*), amanah perluditafsir secara keterbukaan, pertanggungjawaban (*mas'uliyah*), amanah perlu ditafsir secara kreatif dan dilembagakan secara modern. Etika politik diperlukan dalam menggerakkan kontekstualisasi nilai-nilai Islam dalam arti operasional ajaran Islam.¹⁰

Sedangkan Etika politik Islam senantiasa merujuk pada ketentuan Al-Qur'an dan hadist. Dalam Al-Qur'an menyerukan umatnya untuk berlaku adil dan berbuat baik serta belaku amanah.¹¹ Sedangkan menurut Nabi SAW Etika Politik Islam adalah diri sendiri harus menjadi contoh, dalam jiwanya senantiasa berkembang pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada dirinya seputar tanggung jawab pribadinya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, yang dimaksud dengan judul skripsi “KONSEP POLITIK MACHIAVELLI DALAM PERSPEKTIF ETIKA

⁸*Ibid.*, h.886

⁹Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, cet VII, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2003), h. 8

¹⁰Amin Rais, *Krearifan Dalam Ketegasan*, (Yogyakarta: Bilgraf, 1999), h. 100

¹¹Dapartemen Agama, RI., Al-qur'an dan Terjemahan (semarang : Toha Putra, 1989, h. 277

POLITIK ISLAM” adalah pandangan politik Machiavelli dalam sudut pandang etika politik Islam yang menghalalkan segala cara.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Bagi Machiavelli politik hanya berkaitan dengan satu hal semata, yaitu memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Hal lainnya seperti agama dan moralitas, yang selama ini dikaitkan dengan politik sesungguhnya tidak memiliki hubungan mendasar dengan politik, kecuali bahwa agama dan moral tersebut membantu untuk mendapatkan dan mempertahankan politik. Sedangkan menurut ajaran Islam, etika politik harus berdasarkan dengan ketentuan Al-Quran dan Al-Hadist.

2. Alasan Subjektif

- a. Pembahasan mengenai konsep kekuasaan Machiavelli dalam perspektif etika politik Islam karena berhubungan dengan suatu rancangan studi yang peneliti tangkap yakni Pemikiran Politik Islam.
- b. Banyak yang harus dibentuk literature dan sumber data yang akan ditulis melalui buku-buku yang membahas tentang pemikiran-pemikiran seorang Niccolo Machiaveli.

C. Latar Belakang Masalah

Niccola Machiavelli adalah seorang tokoh filsafat dan politikus yang hidup di era ke-18.¹² Tokoh ini sangat terkenal dengan sebutan bapak politik modern yang berhasil membuka keran belenggu politik dari kungkungan Gereja pada waktu itu. Machiavelli banyak menuturkan tentang etika dalam berpolitik pada karyanya. Tetapi disisi lain Machiavelli pun dikenal sebagai politikus yang menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Padahal bila didalami secara objektif, ada faktor-faktor penyebab tokoh ini harus meluangkan idenya seperti itu. Sehingga timbul pertanyaan, apa sebenarnya yang melatarbelakangi pemikiran politik Machiavelli, sehingga dia menulis karyanya *The Prince* dan *The Discourses*.

Dalam membatasi ruang kajian tentang karya-karya Niccola Machiavelli, difokuskan yang ditulis adalah kerangka pemikirannya terhadap etika politik yang dimana ada beberapa alasan yang melatar belakanginya;

1. Proses transisi di Negara Florence yang terjadi dimasa Niccola Machiavelli, melahirkan beberapa gagasannya yang merupakan hasil kajiannya selama menjabat sebagai apparatus di Florence.
2. Dalam situasi dan kondisi Negara Florence Machiavelli mengalami beberapa perlakuan politik dari pemerintahannya yang acap kali terjadi

¹²Dr. Firdaus Syam, M.A, *Pemikiran Politik Barat: Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke-3*. Ed.1, Cet.2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h.105

perpindahan kekuasaan antara penguasa pertama dengan keluarga Medici yang menenangkan peperangan. Sehingga posisi Machiavelli selalu berubah-ubah kadang menjadi aparatur Negara yang begitu penting, dan kadang kala mengalami perlakuan buruk sampai dia sendiri harus diasingkan kesuatu desa yang jauh dari kehidupan kerajaan atau lebih parah lagi dia mengalami masa tahanan selama beberapa tahun.¹³

3. Tokoh Machiavelli sendiri sudah terlanjur dikenali oleh dunia politik sebagai bapak kelicikan politik. Bahkan pada titik ekstrimnya ia dikenal sebagai *par excellence* penipuan dan pengkhianatan politik, sebagai inkarnasi dari kekuatan licik dan brutal dalam dunia politik, dan sebagai penggagasan totalitarianisme modern.¹⁴ Etika menurutnya memancarkan dari tindakan otentik yang penuh dengan kedaulatan dari seorang pemimpin yang berkarakter. Itulah sesungguhnya ide yang diberikan oleh Machiavelli demi kelangsungan dan kestabilan negaranya yang mengalami krisis politik. Namun sayang justru konsep etika dan kekuasaan yang bermartabat inilah sering kurang dicermati oleh para pembaca karya-karya Machiavelli.
4. Kekuasaan memang perlu dipertahankan dan dikokohkan dengan kuat, sedangkan etika itu sendiri tidak perlu dikedepankan dalam politik

¹³*Ibid.*, h. 87

¹⁴Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik Barat: Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Moderen*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 247.

karena hal itu hanya akan memperlemah negara (menghalalkan segala cara demi kestabilan Negara). Sedangkan menurut para sejarawan politik, inovasi Machiavelli dalam buku *The Discourses* dan *The Prince* adalah memisahkan teori politik dan etika. Hal ini bertolak belakang dengan tradisi barat yang mempelajari teori politik dan kebijakan sangat erat kaitannya dengan etika seperti pemikiran Aristoteles yang mendefinisikan politik sebagai perluasan dari etika.

Dalam pandangan barat, politik kemudian dipahami dalam kerangka benar dan salah, adil dan tidak adil. Ukuran-ukuran moral digunakan untuk mengevaluasi tindakan manusia dilapangan politik. Saat itu, Machiavelli telah menggunakan istilah *la stato*, yang berasal dari istilah latin status, yang menunjuk pada adat dan berjalannya kekuasaan dalam arti yang memaksa, tidak menggunakan istilah dominium yang lebih menunjuk pada kekuasaan privat.

Hal ini senada dengan situasi dan kondisi di Florence, waktu itu mengalami perebutan kekuasaan yang mengakibatkan keadaan negara tidak stabil sehingga akhirnya, efek jera perebutan kekuasaan itu menjadikan rakyat tertindas dan Negara pun mengalami krisis multidimensional. Sehingga

Florence menjadi Negara yang lemah dan diserang oleh Negara-negara yang ada disekitarnya.¹⁵

Maka pantaslah bila Machiavelli menganugerahkan gagasannya bagi penguasa di Negerinya yang kala itu dipegang oleh keluarga Medici, dengan tujuan agar Florence tidak hancur dan jatuh. Sekalipun memang ada unsur bahwa dengan menyuguhkan konsepnya itu, Machiavelli pun menginginkan kembali jabatannya di arena politik.¹⁶

Pemikiran kekuasaan Machiavelli didasarkan pada refleksi politik di masa ia hidup. Ia menjadikan fenomena politik yang terjadi ketika itu sebagai pedoman dalam praktik politiknya. Segala macam tindak keburukan dari tabiat manusia Eropa ketika itu ia jadikan sebuah kesimpulan bahwa manusia memang selalu condong kepada hal yang baru, sehingga penguasa juga harus mahir dalam hal ini agar kekuasaannya bisa berjalan efektif dan bertahan lama.¹⁷

Saat ini etika politik seakan sudah tidak dibutuhkan lagi, bahkan cenderung menghilang. Kenyataan yang ada menunjukkan politik sebagai ajang pertarungan kekuatan dan kepentingan, sehingga terdapat kepentingan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Berbicara persoalan etika politik pada hakikatnya membahas persoalan hukum dan kekuasaan. Hukum

¹⁵Niccola Machiavelli, *The Prince*, (Surabaya: Selasa Publishing, 2008), h. xii

¹⁶*Ibid.*, h.177

¹⁷Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, hlm. 126

terdiri dari norma-norma bagi kelakuan yang betul dan salah dalam masyarakat. Artinya, hukum sendiri tidak dapat menjamin agar orang memang taat kepada norma-normanya.

Islam tidak pernah lepas dari politik, bahkan kehadiran Islam sebagai agama yang sempurna mengatur kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan berpolitik, dalam hal ini lebih ditekankan pada etika politik, etika bukan hanya suatu keharusan dalam perilaku politik, namun dalam segala bentuk aktivitas manusia tidak terlepas dari nilai-nilai etika. Terkadang nilai etika tersebut diukur dengan instuisi dan etika tersebut sering diukur dengan agama.

Islam telah memberikan konsepsi perpolitikan dengan adanya perintah mentaati *ulil amri*, termasuk di dalamnya penguasa bidang politik, pemerintah dan negara. Tetapi Islam menghendaki ketaatan kritis yaitu ketaatan yang didasarkan pada tolak ukur kebenaran dari Allah. Jika pemimpin tersebut berpegang teguh pada tuntunan Allah dan Rasul-Nya maka wajib ditaati. Sebaliknya jika pemimpin tersebut bertentangan dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya, maka boleh dikritik atau diberi saran agar kembali ke jalan yang benar dengan cara yang persuasif. Jika jalan tersebut tidak dihiraukan oleh pemimpin, maka boleh saja pemimpin itu tidak dipatuhi.¹⁸

¹⁸Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Cet. 5, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa), 2000, h. 92.

Salah satu persoalan besar dalam kehidupan politik bangsa Indonesia adalah masalah pemerosotan moral, terutama moral pemimpin para elit di negeri ini. Hal ini ditandai dengan terjadinya berbagai bentuk penyelewengan, seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta tindakan pelanggaran lainnya dalam kehidupan politik dan pemerintahan dalam hal ini pada akhirnya melahirkan berbagai macam krisis dalam kehidupan politik bangsa.

Masalah moralitas, kepemimpinan dan kesantunan dalam berpolitik menjadi persoalan panjang yang tidak terselesaikan dalam kehidupan politik bangsa. Perilaku para elit politik yang seringkali meninggalkan nilai-nilai moral luhur dalam melakukan aktivitas politiknya, telah menciderai persoalan moral dalam kehidupan bangsa ini. Berbagai solusi telah ditawarkan, sebagai upaya menyelesaikan persoalan pemerosotan moral dibidang politik yang menimpa bangsa. Salah satunya adalah agar bangsa Indonesia kembali pada ajaran agama, sebagaimana mengatasi persoalan pemerosotan moral, terutama yang terjadi pada elit politik. Tidak kalah pentingnya pada masyarakat bangsa secara keseluruhan.

Bagi para pemikir politik Islam, politik terkait erat dengan etika. Bedanya jika pemikir Yunani membicarakan keterkaitan itu dalam wilayah filsafat moral, pemikir politik Islam mendiskusikannya dalam naungan teologi. Ini terlihat bahwa dalam Islam persoalan politik tidak terpisah dengan persoalan agama.

Islam dalam politik merupakan suatu cara untuk menjaga urusan umat. Islam dan politik tidak bisa di pisahkan karena Islam tanpa politik akan membuat kaum muslim tertindas, tidak memiliki kedamaian dan kerukunan untuk menjalankan syari'at Islam. begitupun politik tanpa Islam akan membentuk masyarakat yang hanya membanggakan jabatan, kekuasaan, dan duniawi saja tetapi dari segi aspek moral dan spritualnya kosong. Jadi dalam hal ini politik Islam sangat penting untuk kebebasan, kemerdekaan dan kedamaian dalam melaksanakan syariat Islam, dan Islam boleh diwadahi oleh politik.¹⁹

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti akan merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Etika Politik Menurut Niccola Machiavelli?
- b. Bagaimana Pemikiran Politik Machiavelli dalam Perspektif Etika Politik Islam?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Kita tahu bahwa setiap usaha yang kita lakukan memiliki tujuan, sama halnya dengan karya ilmiah ini memiliki tujuan yaitu :

¹⁹Zaki Ulya, "Perbandingan Pemilihan Kepala Negara Di Indonesia (Suatu Kajian Hukum Positif Indonesia Dan Fiqh Siyasaah)", Jurnal Al-qadha, vol.2, 2015, h.27.

- a. Untuk mengetahui bagaimana etika politik menurut Niccola Machiavelli
- b. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran politik Machiavelli dalam perspektif etika politik Islam

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Peneliti ini dibuat agar dapat menambah masukan tentang pemikiran politik Islam yang berkaitan dengan konsep pemikiran politik Machiavelli dalam meraih kekuasaan dengan cara menghalalkan segala cara yang sangat bertentangan dengan pandangan etika politik Islam.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi bagi fakultas dan mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Ushuluddin jurusan pemikiran politik Islam terkait dengan konsep politik Machiavelli dalam perspektif etika politik Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library reasearch*).Yaitu mengumpulkan data atau karya ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau mengumpulkan data yang

bersifat kepustakaan atau telah yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah tertentu²⁰

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengungkapkan berbagai informasi kualitatif dengan pendeskripsian yang sangat teliti.²¹

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh penelitian dari sumber pertama.²² Yang menjadi data primer dalam penulisan ini adalah data yang diperoleh langsung dari buku Niccola Machiavelli yaitu buku *The Prince* dan *The Discaourses*.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah jadi, biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen. Data sekunder diperoleh dengan cara mengambil data dari buku, jurnal, serta aturan-aturan yang berkaitan dengan judul penelitian.²³ Seperti buku *Bedah The Prince* dan *The Discaourses*.

²⁰Saifudin Amar, *Metod Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001).h. 5

²¹Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Kuantitati dan RD*, ,(Bandung : Alfabeta, 2008).h. 137.

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R dan D*, , (Bandung : Alfabeta, 2008), h. 137

²³*Ibid*, h. 40.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh suatu kesimpulan yang akurat dalam pemikiran politik Machiavelli menurut pandangan etika politik Islam maka penulis menggunakan alur historis yaitu suatu pola pemahaman dari induksi dan deduksi dimana tidak dapat dipastikan mana yang terjadi terlebih dahulu, maka dari itu dapat dikatakan induksi dan deduksi karena adanya suatu lingkaran historis yaitu dari peristiwa khusus ke umum²⁴

4. Pendekatan

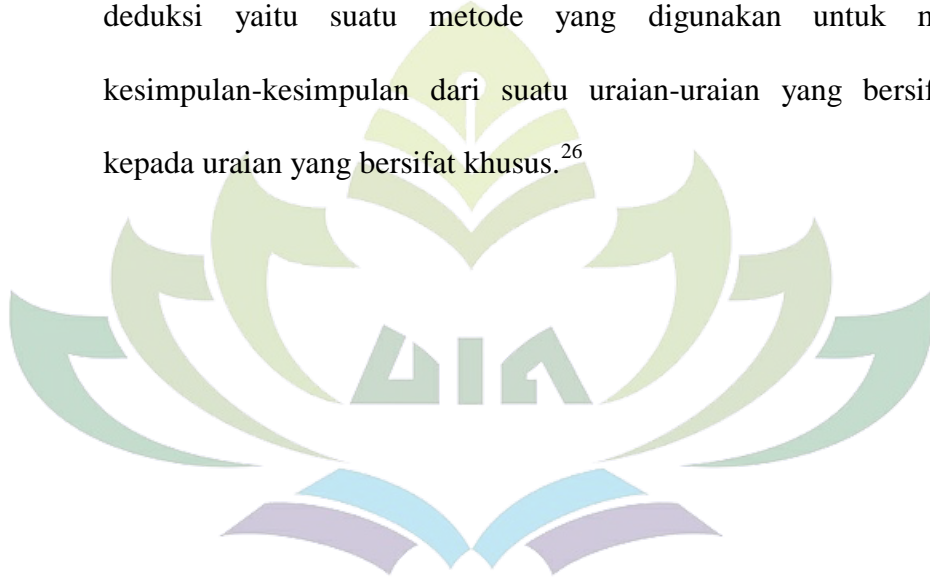
Dilihat secara metodologisnya, pendekatan ini yaitu pendekatan sosio historis yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar belakang sosio pemikiran politik atau pemerintahan dari seorang tokoh, yang pada dasarnya pemikiran seorang tokoh itu datang dari hasil interaksi dengan lingkungannya. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan hermeneutik, yang kedepannya diharapkan bisa memberikan makna atau penafsiran dan interpretasi terhadap fakta-fakta sosio historis yang berkaitan dengan peristiwa-peistiwa masa lampau sesuai dengan konteksnya.²⁵

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990).h. 24.

²⁵Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama : Suatu Kajian Hermaunentik*, (Jakarta : Paramadian, 1996).h. 12-15

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengurutkan dan mengorganisasikan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Setelah melakukan analisis data maka penulis menarik kesimpulan menggunakan metode deduksi. Metode deduksi yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan dari suatu uraian-uraian yang bersifat umum kepada uraian yang bersifat khusus.²⁶



²⁶Anton Bakker dan Achma Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta : Kanisius, 1990).h. 21.

BAB II

KAJIAN TENTANG ETIKA POLITIK ISLAM

A. Pengertian Dasar

1. Pengertian Etika

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).¹ Dalam kaitannya dengan etika tersebut, Bartens menjelaskan etika berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu *ethos* dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari *ethos* adalah *ta etha* artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah etika yang oleh filsuf Yunani, Aristoteles sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral.²

James J. Spillane SJ mengungkapkan bahwa etika atau *ethics* memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menentukan “kebenaran” atau “kesalahan” dan tingkah laku seseorang terhadap orang

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Balai Pustaka, Tahun 2002), h. 271

² Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1

lain.³ Sementara menurut Burhanuddin salam, etika adalah sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.⁴

Etika dilihat dari ruang lingkup dan pengertiannya, etika sangat dekat dengan moral. Kata moral berasal dari bahasa latin yaitu *mos* dan bentuk jamaknya *mores* yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, tabiat, watak, akhlak, dan cara hidup. Oleh karena itu sama halnya dengan etika yang juga dalam bahasa yunani mempunyai pengertian adat istiadat mengenai baik dan buruknya suatu perbuatan.⁵

Machiavelli pun tidak melupakan hal terpenting ini seperti apa yang dituliskannya dalam *The Prince*:

“Sekarang kita bicara soal yang terpenting dari sifat-sifat. Seperti yang disebutkan, penguasa harus menghindari hal-hal yang akan membuatnya dibenci atau dipandang rendah. Bila berhasil, berarti dia telah melakukan bagiannya dan tidak menemui bahaya dalam sifat-sifat buruk lain. Dia akan dibenci bila tamak/serakah dan merampas harta milik warganya serta kaum wanita mereka

³ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1

⁴ Burhanuddin Salam, *Etika Sosial*, (Jakarta: Rineka Cita, 2002), h. 1

⁵ Franz Magniz Suseno, *Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok Etika dan Moral*, (Yogyakarta: Kanesus, 1997), h. 19.

yang mestinya tak boleh dilakukan. Bila dia tidak menyerang harta milik atau kehormatan mereka, mereka akan hidup senang”.⁶

Maka jelaslah dari pernyataan Machiavelli ini, tokoh ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam sebuah Negara. Bahkan dia adalah seorang yang sangat tidak membolehkan adanya korupsi. Terlepas dari apakah ini strategi atau bukan, yang terpenting adalah substansi yang ada dalam ajarannya itu adalah mengandung akan kebutuhan nilai-nilai etika untuk menegakan sebuah Negara.

2. Pengertian Politik

Politik dalam bahasa Inggris *politik*, secara leksikal mengandung arti *acting on judging wisely, well judged, prudent*, yaitu bijaksana atau dengan bijaksana. Politik dalam bahasa Latin adalah *politicus*, dalam bahasa Yunani *politicos*, berasal dari kata *polisi* yang bermakna *city* “kota”. Politik dalam bahasa Indonesia dipahami dengan tiga arti, yaitu (1) segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain, (2) tipu muslihat atau kelecikan, dan (3) dipakai nama disiplin ilmu pengetahuan, yaitu ilmu politik.⁷

Ada dua pendekatan yang dipakai oleh Delier Noer dalam mendefinisikan politik, yaitu: *pertama*, pendekatan yang menekan pada nilai dan *kedua*, pendekatan yang menekan pada perilaku. Pendekatan tersebut mencakup pula

⁶Machiavelli, *The Prince*, h. 127.

⁷ Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), h. 61

nilai-nilai yang selaras dengan etika dalam menetapkan baik buruknya sebuah sistem pemerintahan seperti yang digunakan oleh pakar politik, selain menggunakan faktor-faktor sejarah.⁸

Pengertian Politik menurut Deliar Noer adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat.⁹

Menurut Miriam Budiarjo, pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (*politic*) adalah macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.¹⁰

3. Pengertian Etika Politik

Setelah penjelasan kedua poin di atas, maka tibalah pada intisari penting, yaitu etika politik. Secara substantif pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika, yakni manusia. Oleh karena itu etika politik berkaitan erat dengan bidang pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian “moral” senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika. Dapat disimpulkan bahwa dalam hubungannya dengan masyarakat bangsa maupun negara, etika politik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia. Dasar ini lebih

⁸ M. Thahir Maloko, ETIKA POLITIK DALAM ISLAM, al-daulah Vol. 1/No. 2 / Juni 2013, h. 52

⁹ Deliar Noer, *Pengantar Pemikiran Politik*, (Cet. III ; Jakarta: Rajawali, 1983), H. 6

¹⁰ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h.

meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk beradab dan berbudaya.

Tolok ukur yang diperlukan untuk menilai tindakan manusia secara moral dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ada 3 (tiga) prinsip dasar moral, yaitu prinsip sikap baik, prinsip keadilan dan prinsip hormat terhadap diri sendiri. Prinsip sikap baik sebagai prinsip dasar moral pertama menyangkut sikap dasar manusia yang harus meresapi segala sikap kongkret, tindakan dan kelakuannya. Prinsip sikap baik menuntut suatu pengetahuan tentang realitas supaya dapat diketahui apa yang masing-masing baik bagi yang bersangkutan. Prinsip sikap baik mendasari semua norma moral karena hanya atas dasar prinsip itu masuk akal bagi manusia untuk bersikap adil.¹¹

Prinsip moral kedua adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan memberikan atau mengungkapkan kewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap semua orang lain yang berada dalam situasi yang sama dan untuk menghormati hak semua pihak yang bersangkutan. Prinsip keadilan menuntut agar manusia jangan mau mencapai tujuan-tujuan, termasuk yang baik, dengan melanggar hak seseorang.¹²

Prinsip moral dasar yang ketiga adalah prinsip hormat terhadap diri sendiri. Manusia wajib untuk selalu memperlakukan diri sebagai sesuatu yang bernilai pada dirinya sendiri. Prinsip ini berdasarkan faham bahwa manusia

¹¹ Dwi Siswanto, *Konvergensi Antara Liberalisme dan Kolektivisme Sebagai Dasar Etika Politik Di Indonesia*, h. 268

¹² *Ibid.*, h. 269.

adalah person, pusat berpengertian, dan berkehendak, yang memiliki kebebasan dan suara hati, makhluk berakal budi. Karena itu manusia tidak boleh dianggap sebagai sarana semata-mata demi suatu tujuan tertentu. Ia adalah tujuan yang bernilai padadirinya sendiri. Manusia wajib menghormati harkat dan martabatnya sendiri.¹³

Hubungan di antara ketiga prinsip dasar moral itu sebagai berikut: prinsip keadilan dan hormat pada diri sendiri merupakan syarat pelaksanaan sikap baik, sedangkan prinsip sikap baik menjadi dasar mengapa seseorang bersedia untuk bersikap adil.¹⁴

Dalam kehidupan nyata manusia hendaknya mendasarkan diri pada ketiga prinsip dasar moral ini. Adanya masyarakat, bangsa dan negara tidak lain adalah untuk mewujudkan ketiga prinsip itu untuk menjunjung tinggi harkat kemanusiaan manusia. Etika politik merupakan penjabaran lebih lanjut dari tiga prinsip dasar moral itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁵

Berdasarkan suatu kenyataan bahwa masyarakat, bangsa, maupun negara bisa berkembang ke arah keadaan yang tidak baik dalam arti moral. Misalnya suatu negara yang dikuasai oleh penguasa atau rezim yang otoriter. Dalam suatu masyarakat negara yang demikian ini maka seseorang yang baik secara moral kemanusiaan akan dipandang tidak baik menurut negara serta

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

masyarakat negara. Oleh karena itu aktualisasi etika politik harus senantiasa mendasarkan kepada ukuran harkat dan martabat manusia sebagai manusia.¹⁶

Etika Politik adalah sarana yang diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antar pelaku dan antar kekuatan sosial politik serta antar kelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi dan golongan. Etika politik mengandung misi kepada setiap pejabat dan elite politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertata krama dalam perilaku politik yang toteran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya. Etika politik harus menjadi pedoman utama dengan politik santun, cerdas, dan menempatkan bangsa dan negara di atas kepentingan partai dan golongan.

Penerapan etika politik secara bersamaan dapat dilakukan apabila pemahaman tentang kekuasaan tidak sempit. Seperti halnya dengan politik kualitas-tinggi atau bisa disebut high politic, dan politik kualitas-rendah atau

¹⁶Franz Magnis Suseno, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, h. 15.

low politik. Politik kualitas-tinggi adalah politik pencapaian kekuasaan yang bercirikan kesadaran para pelakunya bahwa posisi, kedudukan dan jabatan adalah manifestasi dari amanah masyarakat yang membutuhkan pertanggungjawaban dan diorientasikan untuk menyejahterakan seluruh masyarakat yang ada. Tujuan etika politik adalah mengarahkan hidup yang lebih baik, bersama dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas lingkup kebebasan, dan membangun institusi-institusi yang adil. Pemahaman etika politik dapat membantu menganalisa korelasi antara tindakan individual, tindakan kolektif, dan struktur-struktur yang ada. Penekanan adanya korelasi ini menghindarkan pemahaman etika politik yang direduksi menjadi hanya sekadar perilaku individu dalam bernegara. Dengan pencapaian ini, etika politik akan kritis terhadap manipulasi atau penyalahgunaan nilai-nilai yang bertentangan. Ia berkaitan dengan masalah struktur sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang mengkondisikan tindakan kolektif.¹⁷

Etika politik digunakan membatasi, meregulasi, melarang dan memerintahkan tindakan mana yang diperlukan dan manayang dijauhi. Etika politik yang bersifat umum dan dibangun melalui karakteristik masyarakat bersangkutan amat diperlukan untuk menampung tindakan-tindakan yang

¹⁷ <http://panah-bambu.blogspot.com/2012/11/etika-politik.html>.

tidak diatur dalam aturan secara legal formal. Jadi etika politik lebih bersifat konvensi dan berupa aturan-aturan moral.¹⁸

Etika politik termasuk dalam kelompok etika sosial yakni yang membahas norma-norma moral yang seharusnya menimbulkan sikap dan tindakan antar manusia, karena hampir semua kewajiban manusia bergandengan dengan kenyataan bahwa ia merupakan makhluk sosial. Etika politik tidak menawarkan suatu sistem normatif sebagai dasar negara. Etika bersifat reflektif yakni memberikan sumbangan pemikiran tentang bagaimana masalah-masalah kehidupan dapat dihadapi, tetapi tidak menawarkan tentang bagaimana cara memecahkannya. Dengan demikian Etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan sebagai warga negara terhadap negara, terhadap hukum yang berlaku dan lain sebagainya. Karena kebaikan manusia sebagai manusia dan kebaikan manusia sebagai warga negara tidak identik. Fungsi etika politik terbatas pada penyediaan pemikiran teoritis untuk mempertanyakan dan menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab, rasional, objektif dan argumentatif. Oleh karena itu tugas etika politik subsider dalam arti membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologi dapat dijalankan dengan objektif artinya berdasarkan argumen-argumen yang dapat dipahami dan ditanggapi oleh semua pihak yang mengerti permasalahan. Etika politik

¹⁸Lihat http://www.setneg.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=2802, dihasilkan 16 April 2015 pukul 12.23 PM.

dapat memberikan patokan-patokan, orientasi dan pegangan normatif bagi mereka yang memang ingin menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolok ukur martabat manusia.¹⁹

Selain itu etika politik dapat berfungsi sebagai sarana kritik ideologi (bukan negara dan hukum) berupa paham paham dan strategi legitimasi yang mendasari penyelenggaraan negara. Jadi etika politik hanya dapat membantu usaha masyarakat untuk menegajawantahkan ideologi negara yang luhur ke dalam realitas politik yang nyata. Misalnya, dengan merefleksikan inti/ hakikat keadilan sosial, bagaimana kekuasaan harus ditangani agar sesuai dengan martabat manusia.²⁰

Etika politik sangat terkait dengan hukum dan kekuasaan. Etika politik bersifat metafisis dan dianggap kurang realistik, di sini filosof sering acuh tak acuh. Namun para filosof berjasa mengkritisi dasar-dasar legitimasi kekuasaan politik. Dalam pandangan filosof etika, politisi harus bertindak benar, bertanggung jawab serta argumentative dalam prilaku politik mereka.²¹ Karena bagaimana pun juga, baik dan buruknya kondisi lingkungan sosial, sangat tergantung pada keputusan politik.

Etika politik menuntut agar segala klaimatas hak untuk menata masyarakat dipertanggungjawabkan pada prinsip-prinsip moral dasar. Dalam konteks ini

¹⁹Runi Hariantati, Etika Politik Dalam Negara Demokrasi, Jurnal Demokrasi, Vol. II No. 1 Th. 2003, h. 61.

²⁰*Ibid.*, h. 62.

²¹Franz Magnis Suseno, Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, h. 2.

pula etika politik berfungsi sebagai sarana kritik ideologi. Lebih jelasnya, sumbangan etika politik terhadap pembangunan masyarakat justru bahwa komitmen satu-satunya adalah pada pencarian kebenaran, entah kognitif, entah normatif, dengan tidak peduli apakah pihak-pihak yang berkuasa menganggapnya tepat atau tidak. Hasil pencarian kebenaran, apalagi kebenaran praktis yang berelevansi luas bagi kehidupan masyarakat, dengan sendirinya pantas untuk selalu disuarakan.²² Etika itu bersifat refleksif atau meta-real. Menurut Magniz Susesno, etika politik merefleksikan: apa yang menjadi inti keadilan, apa yang menjadi dasar etis sebuah kekuasaan dan bagaimana kekuasaan harus dijalankan. Etika politik tidak antipati pada ideologi dan tidak menjadi cara atau norma tertentu, tetapi membimbing politik yang luhur.²³

Etika politik tidak berada di tingkat sistem legitimasi politik tertentu dan tidak dapat menyaingi suatu ideologi negara. Tetapi etika politik dapat membantu usaha masyarakat untuk menegajawantahkan ideologi negara yang luhur ke dalam realitas politik yang nyata. Misalnya dengan merefleksikan apa inti keadilan sosial, apa dasar etis kerakyatan, dan bagaimana kekuasaan harus ditangani supaya sesuai dengan martabat manusia dan sebagainya.²⁴

Etika politik adalah prinsip atau ajaran nilai sosial politik Islam, seperti persamaan (musawah), persaudaraan (ukhuwah), musyawarah (syura),

²²*Ibid.*, h. 6.

²³*Ibid.*, h. 12.

²⁴*Ibid.*, h. 7.

keterbukaan, pertanggungjawaban (mas'uliyah), amanah perlu ditafsir secara kreatif dan dilembagakan secara modern. Etika politik diperlukan dalam menggerakkan kontekstualisasi nilai-nilai Islam dalam arti operasional ajaran Islam.²⁵

B. Etika Politik Islam

Etika politik Islam adalah seperangkat aturan atau norma dalam bernegara di mana setiap individu dituntut untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan Allah sebagai mana tercantum dalam al-Qur'an. Adapun mengenai aplikasi nilai-nilai etika tersebut merujuk kepada pola kehidupan Nabi Muhammad Saw baik dalam kehidupan secara umum maupun secara khusus, yaitu dalam tatanan politik kenegaraan.

Tidak diragukan lagi bahwa sistem kepemimpinan yang paling sempurna dan ideal kepemimpinan yang dijalankan oleh Nabi Muhammad Saw. sistem kepemimpinan yang dipraktikkan Rasulullah didasarkan atas kapasitasnya sebagai nabi dan rasul Allah yang memiliki sifat-sifat shiddiq, amanah, tabligh, dan fathanah. Keempat sifat inilah yang mewarnai pola laku dan kebijakan Rasulullah dalam memimpin umatnya. Setelah kewafatan beliau, sifat-sifat ini tidak dimiliki sepenuhnya oleh empat khalifah sesudahnya. Namun, salah satu sifat itu tetap menonjol dalam sistem kepemimpinan mereka, seperti sifat shiddiq sangat menonjol dalam kepribadian Abu Bakar. Sifat amanah menjadi ciri khas

²⁵ Amin Rais, *Kearifan Dalam Ketegasan*, (Yogyakarta: Bilgraf, 1999), h. 100.

kepemimpinan Umar bin Khattab. Sifat tabligh sangat menjiwai Utsman bin 'Affan. Dan sifat fathanah "cerdas dan berpengetahuan luas" menjadi karakteristik Ali bin Abi Thalib.

Sistem kepemimpinan umat pasca kewafatan Rasulullah menjadi sebuah model untuk masa-masa berikutnya. Memang benar bahwa Rasulullah tidak meninggalkan wasiat mengenai penggantinya untuk meneruskan kepemimpinan. Tetapi para sahabat dapat menilai di antara mereka yang lebih berhak dan pantas untuk memimpin. Maka, tampilan Abu Bakar sebagai khalifah pertama yang diangkat berdasarkan musyawarah para sahabat dari golongan muhajirin dan Anshar. Kemudian, tampil Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua berdasarkan kaderisasi yang dilakukan Abu Bakar dan dimusyawarahkan bersama sahabat-sahabat lain pada masa hidupnya. Selanjutnya, khalifah yang ketiga, Ustman bin 'Affan dipilih berdasarkan musyawarah tim formatur yang dibentuk oleh Umar bin Khattab semasa hidupnya, yang diketuai oleh Abdurrahman bin 'Auf. Setelah itu, kepemimpinan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, sebagai khalifah keempat, yang diangkat oleh mayoritas kaum muslimin. Namun, ada juga pihak yang tidak setuju karena perbedaan prinsip dan kepentingan. Sejarah mencatat bahwa sejak akhir pemerintahan Ustman bin 'Affan sampai pemerintahan Ali bin Abi Thalib, situasi politik terus bergejolak kemudian, sistem kepemimpinan bergaul dengan dinasti, yaitu Dinasti Bani Umayyah dan Dinasti Bani Abbasiyyah dan dinasti-dinasti lainnya.

Etika atau filsafat moral (Telchman, 1998) mempunyai tujuan menerangkan kebaikan dan kejahatan. Etika politik dengan demikian, memiliki tujuan menjelaskan mana tingkah laku politik yang baik dan sebaliknya. Apa standar baik? Apakah menurut agama tertentu? Bisa iya, bisa juga tidak! Tapi yang penting adalah standar baik dalam konteks politik adalah bagaimana politik diarahkan untuk memajukan kepentingan umum. Jadi kalau politik sudah mengarah pada kepentingan pribadi dan golongan tertentu, itu etika politik yang buruk. Sayangnya, itulah yang terjadi di negeri kita tercinta ini.

Politik yang baik adalah politik yang bisa mencapai tujuannya, apa pun caranya. Relevansi etika politik terletak pada kemampuannya untuk menjinakkan kekuatan itu dan mengatur kepentingan-kepentingan kelompok dengan membangun institusi institusi yang lebih adil.

Dalam kaitannya etika dan politik, filsafat politik dahulu mempersoalkan tentang masalah nilai etika, pertanyaan yang diajukan merupakan abstraksi moral yang bersumber dari upaya manusia untuk memaknai kehidupan dengan ajaran yang lebih baik dan pasti.²⁶

Menurut Magniz Suseno, etika politik pada dasarnya merupakan salah satu cabang dari filsafat. Sebagai usaha ilmiah, filsafat dibagi kedalam beberapa cabang. Dua cabang utama filsafat adalah filsafat teoritis dan filsafat praktis. Filsafat teoritis mempertanyakan apa yang ada dan bagaimana manusia harus bersikap terhadap apa yang ada tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul

²⁶Jan Hendrik Rapar, *Pengantar Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), h. 76

diwilayah ini adalah apa itu manusia, alam, hakikat, realitas, apa itu pengetahuan, dan lain sebagainya. Sedangkan filsafat yang langsung mempertanyakan praktis manusia adalah etika.²⁷

Beberapa prinsip ajaran Islam yang dapat dijadikan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain meliputi kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, keadilan sosial, persamaan, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dalam konteks kenegaraan, amanah dapat berupa kekuasaan ataupun kepemimpinan. Kekuasaan adalah amanah, maka Islam secara tegas melarang kepada pemegang kekuasaan agar melakukan *abusei* atau penyalahgunaan kekuasaan yang diamanahkannya. Karena itu pemegang kekuasaan atau pemimpin wajib berlaku adil dalam arti yang sesungguhnya.²⁸

Alquran adalah petunjuk bagi umat Islam, maka tidak berlebihan apabila Alquran dijadikan sebagai konsep etika politik, dimana etika ingin menjawab “bagaimana hidup yang baik”.²⁹ Dengan demikian Alquran menerangkan tentang etika dan moral sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Imran/ 3:159

مُهِمَّوَأَسْتَغْفِرْ عَنْهُمْ فَاعْفُ حَوْلَكَ مِنْ لَأَنْفَضُوا الْقَلْبَ غَلِيظًا فَظًا كُنْتَ وَلَوْ لَهُمْ لِنْتَ اللَّهُ مِنْ رَحْمَةٍ فِيمَا

﴿الْمُتَوَكِّلِينَ تَحِبُّ اللَّهُنَّ عَلَى فَتَوَكَّلْ عَزَمْتَ فَاذًا الْأَمْرِ فِي وَشَاوَرَهُ﴾

²⁷ *Ibid*, h. 12

²⁸ *Ibid*, h. 54

²⁹ Muslim, *Ancaman Bagi Penguasa Zalim Tetap Abadi di Neraka*, (Cet, I; Surabaya: CV. Cuitra Pelajar, 1998), h. 10

Artinya: *‘Maka disebutkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma’afkanlah mereka mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawaqalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawaqal kepada-Nya’*.³⁰

Kandungan ayat tersebut diatas menerangkan tentang etika dan moral kekuasaan yang diperlukan untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi umat, antara lain memiliki sifat lemah lembut dan tidak menyakiti hati orang lain dengan perkataan atau perbuatan, serta memberi kemudahan dan ketentraman kepada masyarakat. Sifat-sifat ini merupakan faktor subyektif yang dimiliki seorang pemimpin yang dapat merangsang dan mendorong orang lain untuk berpartisipasi dalam musyawarah. Sebaliknya, jika seorang penguasa tidak memiliki sifat-sifat tersebut diatas, niscaya orang akan menjauh dan tidak memberi dukungan.³¹

Faisal Baasir mendasarkan etika politik bangsa dan negara pada nilai-nilai ajaran agama adalah suatu keharusan. Sebab agama merupakan sistem nilai yang

³⁰ Departemen Agama, *Al Qur’amn dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), h.

³¹ Abdul Muin Salim, *Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur’an*, (Cet, III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 34

diyakini kebenarannya, ia adalah lentera dan panduan kehidupan serta modal ketenangan jiwa sebelum seseorang menentukan suatu tindakan tertentu.³²

Kekuasaan sebagai amanah merupakan prinsip ajaran Islam yang dapat dijadikan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip amanah tercantum dalam Alquran surah Al-Nisa/4:58-59

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٖ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩﴾

Artinya: ‘‘*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Melihat*’’.³³ *Wahai orang-orang yang beriman Taatilah Allah, taatilah rasul, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika ka mu berselisih tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnah) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) lagi lebih baik akibatnya*’’.

Kedua ayat tersebut dinilai oleh para ulama sebagai prinsip-prinsip pokok yang menghimpun ajaran Islam tentang kekuasaan dalam pengertian tanggung jawab

³² Faisal Baasir, *Etika Politik: Pandangan Seorang Politisi Muslim* (Cet, I; Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), h. xxxvii

³³ *Ibid*, h. 87

terhadap amanahnya serta kekuasaan Allah SWT.³⁴ Hal ini menandakan bahwa semua aspek kehidupan manusia telah diatur oleh Allah SWT melalui konstitusi yang ada di dalam Al-Qur'an, ini menandakan adanya syumuliatul Islam.

Amanat dimaksudkan berkaitan dengan banyak hal, salah satu di antaranya adalah perlakuan adil. Keadilan yang dituntut ini bukan hanya terhadap kelompok, golongan, atau kaum muslim saja, tetapi mencakup seluruh manusia bahkan seluruh makhluk. Karena keadilan mendekatkan pelakunya kepada ketaqwaan. Obyektifitas hakim menjadi bagian penting dalam memutuskan perkara. Ketika perkara putus dengan pertimbangan matang, keadilan dapat ditegakkan. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa wajiblah atas penguasa menyerahkan suatu tugas dari tugas-tugas kaum Muslimin kepada orang yang cakap/kompeten untuk melaksanakan pekerjaan itu.

Kandungan ayat tersebut diatas menerangkan tentang etika dan moral kekuasaan yang diperlukan untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi umat, antara lain memiliki sifat lemah lembut dan tidak menyakiti hati orang lain dengan perkataan atau perbuatan, serta memberi kemudahan dan ketentraman kepada masyarakat. Sifat-sifat ini merupakan faktor subyektif yang dimiliki seorang pemimpin yang dapat merangsang dan mendorong orang lain untuk berpartisipasi

³⁴Abdul Mu'' in Salim, *Fiqh Siyasa: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), h. 175

dalam musyawarah. Sebaliknya, jika seorang penguasa tidak memiliki sifat-sifat tersebut diatas, niscaya orang akan menjauh dan tidak memberi dukungan.³⁵

Jika kita merujuk pada isi kandungan al-Qur'an, ternyata ada sekitar 500 ayat yang membicarakan tentang konsep atau ajaran etika. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya etika dalam sistem kehidupan manusia. Etika yang diajarkan al-Qur'an mengacu kepada standar yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Actor yang menjadi contoh konkret dalam bidang etika ini adalah langsung Nabi Muhammad Saw sendiri. Karena itu, dalam perspektif Islam, etika tidak saja merupakan ajaran yang bersifat konseptual saja, tetapi juga dilengkapi dengan praktik empiric.

Keberadaan Nabi Muhammad Saw sebagai figur keteladanan dalam bidang tingkah laku (behaviour) telah memberikan kontribusi penting dalam penerapan nilai-nilai etika yang dapat ditiru secara langsung oleh manusia. Nabi Muhammad Saw sendiri mengaku bahwa seluruh kandungan al-Qur'an adalah cerminan akhlaknya. Dari sisi ini, al-Qur'an berarti kitab yang mengajarkan etika, akhlak, atau moral bagi kehidupan manusia. Maka, tidaklah mengherankan jika kajian etika politik pun dapat dirujuk kepada al-Qur'an. Dalam kaitan ini, menyatakan bahwa "al-Qur'an mengandung pesan-pesan moral yang sangat sistematis. ajaran-ajaran tentang moral ini dapat dijadikan sebagai satu standar nilai yang dituangkan dalam bentuk etika Qur'ani."

³⁵ Abdul Muin Salim, *Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, (Cet, III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 34

Islam adalah agama *syumul* (mengatur segala aspek), lengkap dengan petunjuk untuk mengatur semua aspek kehidupan. Dalam lapangan politik, kekuasaan tertinggi (disebut kedaulatan) ada di tangan Allah SWT. Manusia hanya sebagai pelaksana kedaulatan itu. Olehnya itu manusia disebut khalifah yang berarti wakil atau perwakilan Allah SWT di bumi ini. Sebagai makhluk yang diberi tugas untuk memakmurkan dan mengatur bumi ini, tentu saja hal-hal yang dilakukan oleh manusia harus senantiasa sesuai dengan kehendak Allah SWT. Sebagai pemberi amanah tersebut.

Berbeda dengan konsep politik Machiavelli. Menurut pemikiran Machiavelli yang terpenting dalam politik pemerintahan Negara adalah kekuasaan, dia menghalalkan segala cara untuk tetap berkuasa. Jadi yang dianjurkan bukan bagaimana melaksanakan etika bernegara yang baik tapi bagaimana seseorang atau sekelompok orang dapat merebut kekuasaan dan mempertahankannya. Machiavelli lebih jauh berpendapat bahwa dalam praktek kekuasaan yang nyata, tidak ada hubungan antara kekuasaan tersebut dengan etika bernegara, karena Negara itu bagi Machiavelli bersifat secular, termasuk didalam berbagai perebutan kekuasaan, sedangkan etika berkaitan dengan norma yang berkenaan dengan peraturan Tuhan yang transedental sifatnya, yaitu dianggap berorientasi pada dunia ghaib.

Memperbincangkan persoalan etika politik adalah sesuatu yang sangat penting dalam Islam, karena berbagai alasan, di antaranya; Pertama, politik itu dipandang sebagai bagian dari ibadah, karena itu harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip

ibadah. Misalnya, dalam berpolitik harus diniatkan dengan lillahi taala. Dalam berpolitik, kita tidak boleh melanggar perintah-perintah dalam beribadah, karena pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ibadah akan dapat merusak “kesucian” politik itu sendiri. Kedua, etika politik dipandang sangat perlu dalam Islam, karena politik itu berkenaan dengan prinsip Islam dalam pengelolaan masyarakat. Dalam berpolitik sering menyangkut hubungan antar-manusia, misalnya saling menghormati, saling menghargai hak orang lain, saling menerima dan tidak memaksakan pendapat sendiri.

C. Etika Politik Di Indonesia

Muslim sedunia, maka penerimaan atas nilai-nilai Islam yang berkembang di masyarakat merupakan suatu keniscayaan. Mencermati kondisi dan keadaan Indonesia semenjak era reformasi yang serba boleh ini, kemunduran etika politik para elite dalam setiap jejak perjalanannya membuat kita menjadi “miris”.³⁶Sikap pragmatisme dalam perilaku politik yang hanya mementingkan individualisme dan kelompoknya saja. Kepentingan bangsa, menurut mereka bisa dibangun melalui kelompoknya.

Politik identik dengan cara bagaimana kekuasaan diraih dan dengan cara apa pun, meski bertentangan dengan pandangan umum. Tanpa kita sadari, nilai etis politik kita cenderung mengarah pada kompetisi yang mengabaikan moral.

³⁶M. Sidi Ritaudin, *Etika Politik Islam*, (Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, 2015), cetakan Pertama., h. 96.

Buktinya, semua harga jabatan politik setara dengan sejumlah uang. Semua jabatan memiliki harga yang harus dibayar si pejabat. Itulah mengapa para pengkritik dan budayawan secara prihatin menyatakan arah etika dalam bidang politik dan bidang lainnya menuju ke arah ‘jual beli’ menggunakan uang maupun sesuatu yang bisa dihargai dengan uang. Kita boleh bangga negara kita sebagai negara demokrasi yang damai terbesar ketiga setelah Amerika dan India.³⁷

Praktis pelaksanaan etika politik nampaknya masih nirkeadilan dan nirkemakmuran rakyat. Kebanyakan politisi masih dikuasai hasrat berkuasa ketimbang sebagai ‘penyambung lidah’ dan penyalur aspirasi rakyat. Tanpa ada beban moral sedikit pun, mereka kerap melupakan begitu saja janji-janji kampanyenya setelah mereka berkuasa.³⁸ Pada titik inilah, masyarakat dibuat kecewa, sinis dan skeptik dengan politik. Itulah sekelumit gambaran singkat dan sederhana akan kondisi negeri kita tercinta yang carut marut ini. Akan tetapi kita harus tetap optimis demi untuk kemajuan negara ini. Eksistensi kepemimpinan melalui consensus lima tahunan harus didukung dan ditoleransi selama berada koridor kebersamaan. Begitupun kontrol yang dilakukan legislatif, yudikatif dan eksekutif atau control yang dilakukan oleh legislative terhadap eksekutif harus mengacu kepada kepentingan rakyat, bukan pada lembaga. Dengan cara seperti itu, maka Negara kita akan menjadi negara dengan ‘religious state’ yang memperhatikan nilai-nilai agama dalam hal ini agama Islam.

³⁷*Ibid*, h. 97.

³⁸*Ibid*, h. 99

Dengan cara seperti itu, maka yang biasanya dikenal bahwa politik itu kotor, korup, kejam, tak manusiawi dipenuhi dengan taktik dan intrik demi merebut dan mempertahankan kekuasaan. Saling menyikut bahkan terhadap teman sekalipun, karena dalam politik tidak ada pertemanan abadi, yang abadi hanyalah kepentingan bisa dibenahi menjadi lebih baik dan mulia.³⁹

Namun demikian pertautan antara moral dan politik perlu mendapat perhatian yang lebih, sebab, moral merupakan salah satu faktor kunci yang diharapkan mampu berperan untuk memperbaiki krisis bangsa. Moral dianggap sebagai sumber inspirasi dan kekuatan etis yang dapat memberikan wajah manusiawi terhadap proses pembangunan politik, di sinilah, pemikiran tentang revolusi moral politisi muncul dan merupakan kebutuhan mendesak berdasarkan kenyataan bahwa hingga kini sistem politik bangsa Indonesia belum dapat menyediakan cara-cara yang dapat membawa bangsa ini keluar dari krisis. Perubahan moral politisi menjadi hal yang penting untuk agenda perbaikan bangsa mengingat di tangan merekalah segala kebijakan yang menyangkut hajat hidup rakyat dipertaruhkan.⁴⁰

Meskipun memang sulit memberi penilaian etis tidaknya kepada mereka yang berperilaku politik seperti itu (kotor), karena dasar hukumnya memang tidak ada. Namun, etika memang bukanlah soal hukum (peraturan tertulis), karena etika haruslah dilandasi dengan apa yang di Indonesia disebut “kepantasan” atau “kepatutan”. Jadi, ia haruslah mempertimbangkan nilai-nilai dan norma-norma

³⁹*Ibid*, h.100.

⁴⁰*Ibid*, h. 100.

yang berlaku di masyarakat. Ia juga harus memperhatikan kelaziman-kelaziman serta suasana batin masyarakat sesuai konteks waktu dan perkembangan situasi kondisi. Ada nalar, juga rasa, yang mestinya diseimbangkan. Dengan demikianlah kekuasaan tak semata berorientasi kepentingan praktis, melainkan alat belaka untuk melayani. Etika terkait dengan hakikat kebaikan dan keburukan.⁴¹

Etika menjadi penjas bagi kita semua bahwa ada perbuatan yang digolongkan baik dan ada yang buruk. dengan demikian, maka etika politik juga menjelaskan tentang mana politik yang baik dan mana yang buruk. kewajiban kita sebagai orang yang memiliki religiositas adalah mengikuti politik yang baik dan menjauhi politik yang buruk. dalam praktik kehidupan politik di negeri ini, politisi tampaknya memahami hakekat politik secara sempit dan konservatif. Politik dimengerti terbatas pada cara bagaimana seorang politikus atau parpol dapat memenangkan pemilu, meraih kursi atau posisi di legislative dan eksekutif, kemudian melanggengkannya sehingga memperoleh posisi “terhormat” dalam masyarakat. Di samping itu, terjun ke “dunia” politik dianggap menjanjikan penghasilan besar lewat jalan pintas, tanpa syarat pendidikan tinggi. Hanya sebagian kecil saja dari mereka yang memandang politik sebagai salah satu cara untuk menata kehidupan negara agar terwujud kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran rakyat.⁴²

Kebanyakan politisi masih dikuasai hasrat berkuasa ketimbang sebagai “penyambung lidah” dan penyalur aspirasi rakyat. Tanpa ada beban moral sedikit

⁴¹*Ibid*, h. 101

⁴²*Ibid*, h. 101

pun, mereka kerap melupakan begitu saja janji-janji kampanye setelah mereka berkuasa, pada titik inilah, masyarakat dibuat kecewa, sinis dan skeptis dengan politik. Solusi yang paling jitu tegakkan etika dalam berpolitik, jangan sampai demi mencapai tujuan, maka menghalalkan segala cara.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari pengulangan penelitian dengan membahas permasalahan yang sama dari seseorang baik dalam bentuk buku ataupun dalam tulisan yang lain, maka penulis memaparkan karya ilmiah sebelumnya yang menjadi acuan penelitian ini diantaranya :

Pertama, Penelitian ini dilakukan oleh Mia Rinekasswara mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2016. Dengan judul Analisis Perilaku Di Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Politik Niccolla Machiavelli.

Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah kondisi realitas perpolitikan Indonesia saat ini banyak kasus korupsi yang merugikan banyak masyarakat, para koruptor mementingkan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan banyak orang, situasi Indonesia saat ini tidak jauh dari gambaran Machiavelli itu. Politik dan moral menjadi dua dunia yang berbeda. Etika politik seakan menjadi dua dunia yang berbeda. Etika politik seakan menjadi relevan. Relevansi etika politik terbuka apabila mampu mengatur institusi-institusi yang lebih adil. Hanya di Indonesia kecurigaan antar kelompok sangat

dalam. Padahal, etika politik mulai dengan adanya kepercayaan terhadap yang lain.

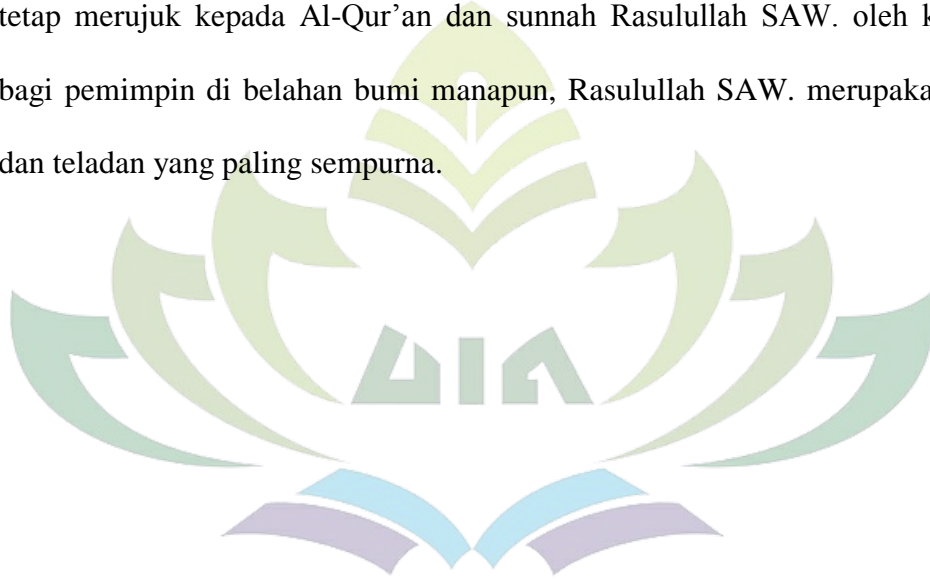
Kedua, penelitian ini dilakukan oleh Zainun Akbar, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan Judul Konsep Meraih Kekuasaan Menurut Machiavelli (Studi Kasus Pilkada Aceh Tenggara 2017)

Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah konsep kekuasaan Menurut Machiavelli serta kaitan dengan Fiqih Siyasah terhadap Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum apabila melihat konteks hidupnya, saya tidak setuju yang disampaikan pemikiran machiavelli, kalau bisa tidak diterapkan pemikiran politik Machiavelli. Tapi tidak menyarankan melakukannya hal tersebut jika keadaan yang didapat lebih tenang. Machiavelli masih berpegang teguh bahwa seorang pemimpin penting untuk tampil sebagai orang yang dicintai oleh rakyatnya.

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Ahmad Ilyas Hidayat, mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2012 dengan judul Kekuasaan Perspektif Politik Islam.

Permasalahan yang diangkat pada permasalahan penelitian ini bahwa Kekuasaan yang sejalan dengan politik Islam adalah kekuasaan yang seperti dicontohkan Rasulullah SAW. dalam kepemimpinannya. Kekuasaan itu sendiri

terbagi tiga, yaitu legislative, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Hal ini memberikan gambaran bahwa pemerintahan atau pemimpin yang menjadi penguasa bukanlah penguasa tunggal. Tetapi, dibantu oleh beberapa ahli dalam bidangnya masing-masing, agar kekuasaan yang muncul kemudian bukanlah kekuasaan yang bersifat dictator dan sewenang-wenang. Islam adalah agama rahmat, yang telah mengajarkan tata cara berpolitik yang islami, yaitu dengan tetap merujuk kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, bagi pemimpin di belahan bumi manapun, Rasulullah SAW. merupakan panutan dan teladan yang paling sempurna.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdullah, Umar, *Kapitalisme: The Stanic Of Ideology*, Bogor: El-Moesa Press, 2007.
- Abuddin, Nata, *Metodologi Studi Islam*, Cet. 5, Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa, 2000.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1990.
- Bertens, K. *Etika* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Budiardjo, Miriam *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Calvert, Peter. *Proses Sukses Politik*, Jogjakarta: Tiara Wacana Yogya, 1995.
- Departemen Agama, RI., *Al-qur'an dan Terjemahan*, Semarang : Toha Putra, 1989.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Tahun 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2011.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hidayat, Komaruddin. *Memahami Bahasa Agama : Suatu Kajian Hermeneutik*, (Jakarta : Paramadion, 1996
- Honohan, Iseult. *Civic Republicanism: Negara Republik*. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Iqbal, Muhammad. *Etika Politik Qur'an: Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Ayat-Ayat Kekuasaan*, Medan: IAIN Press, 2010.
- J. Schmandt, Henry. *Filsafat Politik Barat: Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Moderen*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Kadir, Muhammad Abdul. *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

- Khaldun, Ibnu. *Muqaddimah Ibnu Khaldun*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Mohamad Saleh dan Kasman Singodimejo, Machiavelli, Jakarta: Permata Jakarta, 1973.
- Lerner, Max. *Pendahuluan, dalam The Prince dan The Discourses*, New York: Modern Library, 1950.
- Leonardo Williams dan Joseph Losco, *Political Theory, Kajian Klasik dan Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Lubis, Suhrawardi K. *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Machiavelli, Niccola. *The Discaourses*, Cet. 2, Yogyakarta : Narasi-Pustaka Promethea, 2018.
- Machiavelli, Niccola. *The Prince*, Cet. I, Surabaya : Penerbit Ecosystem Publishing, 1957.
- Magnis, Suseno. Franz. *Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010.
- Maloko, M Thahir. *Etika Politik Dalam Islam*, al-daulah Vol. 1/No. 2 / Juni 2013.
- Muslim, *Ancaman Bagi Penguasa Zalim Tetap Abadi di Neraka*, Cet. I, Surabaya: CV. Cuitra Pelajar, 1998.
- Mxey. *Political Philoshophies*, dalam Ali, *Filsafat Politik Antara Barat dan Islam*.
- Mu'ti, Muhammad, Ali Abdul. *Filsafat Politik Antara Barat dan Islam*, Bandung; CV Pustaka Setia, 2010.
- Nata, Abbudin. *Metodologi Studi Islam*, Cet. 5, Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa, 2000.
- Noer, Deliar. *Pemikiran Politik di Negeri Barat*. Bandung: Mizan Media Utama, 2001.
- Otten, J.F. *Konsep Machiavelli*, Jakarta: Rajawali press, 1963.
- Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Rais, Amin. *Krearifan Dalam Ketegasan*, Yogyakarta: Bilgraf, 1999.
- Rapar, Jan Hendrik. *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Ritaudin, Sidi. *Etika Politik Islam*, Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, 2015, cetakan Pertama.

- Said, Muhammad. *Etika Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Paramita, 1960.
- Salam, Burhanuddin. *Etika Sosial, Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*.
- Salim, Abdul Mui. *Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, Cet, III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soehino. *Ilmu Politik*, Jogjakarta: Libery Yogyakarta, 1981.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R dan D*, Bandung : Alfabeta, 2008.
- Suhelmi, Ahmad. *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat, dan Kekuasaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Surakhmad, Winardo. *Pengantar Pengertian Ilmiah Metode Dasar Teknik*, Bandung : Tartisto, 1982.
- Syam, Firdaus. *Pemikiran Politik Barat :Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya Terhadap Dunia ke-3*, Cet. 2, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Dokumen Jurnal

- Azhar, Muhammad Thahir. *Etika Politik Muhammed Arkoun*, Jurnal Disertasi, vol. 10 no. 1, juni 2012.
- Hariantati, Runi. *Etika Politik Dalam Negara Demokrasi*, Jurnal Demokrasi, Vol. II. No. 1 Th. 2003.
- Mujahid, Haikal. *Etika dan Kekuasaan : Pemikiran Nicccola Machiavelli Atas Etika Dan Kekuasaan Dalam Ranah Politik*, Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta , 2011.
- Ulya, Zaky. ‘‘Perbandingan Pemilihan Kepala Negara Di Indonesia, Suatu Kajian Hukum Positif Indonesia Dan Fiqh Siyasaah’’, Jurnal Al-qadha, 2015.
- Yusup, Himyari. *Pergumulan Pemikiran Politik Kontemporer, Menjelajah Urgensi Politik islam Pada Era Global*. Jurnal Tapis Vol 8 No.2 Juli-Desember 2012

Dokumen Internet

- Jhon, Senelson. ‘‘Etika Politik Niccola Machiavelli,’’ artikel diakses pada 5 Januari 2011 dari <http://macheda.blog.uns.ac.id/2009/09/27/pemikiran-niccola-machiavelli>.

Ricahrdodi, Charles. ‘‘Alam Pikiran Machiavelli, artikel diakses pada 15 oktober 2009 dari <http://politik saman.com/2009/02/15>.

Tim Madigan, *I Gave Them A Sword, Philosophy Now* – Issue 97 https://philosophynow.org/issues/97/I_Gave_Them_A_Sword diakses pada 11 Desember 2016 pukul 14:35.

Warner, Bruce. ‘‘*Pemikiran Politik Niccola Machiavelli,*’’ artikel diakses pada 2 Januari 2011 dari <http://macheda.blog.uns.ac.id/2009/09/27/pemikiran-niccola-machiavelli>.

